



BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG

NOMOR 76 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN UANG JASA DAN UANG TRANSPORT BAGI

TENAGA KONTRAK KERJA DAN PIHAK KETIGA

DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BULELENG

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan APBD dalam kegiatannya diperlukan berbagai jenis biaya, maka dipandang perlu untuk mengatur batasan biaya yang dikeluarkan untuk mendukung kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Buleleng tentang Pemberian Uang Jasa dan Uang Transport Bagi Tenaga Kontrak Kerja dan Pihak Ketiga dalam Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 786 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2007 Nomor 269), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 786 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN UANG JASA DAN UANG TRANSPORT BAGI TENAGA KONTRAK KERJA DAN PIHAK KETIGA DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Tenaga Kontrak Kerja yang selanjutnya disebut Tenaga Kontrak adalah Tenaga yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
5. Pihak ketiga/masyarakat yang selanjutnya disebut Pihak Ketiga adalah Orang/Badan/Lembaga dan sejenisnya diluar Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Tenaga Kontrak Kabupaten Buleleng.

6. Uang Jasa adalah uang yang diberikan kepada Tenaga Kontrak Kerja dan Pihak Ketiga sebagai pengganti atau imbalan atas jasa yang telah dilakukan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng.
7. Uang Transport adalah uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga sebagai pengganti transport atau sewa alat angkut Pihak Ketiga dalam melaksanakan tugas dari Pemerintah Kabupaten Buleleng.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
9. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Uang Jasa dan Uang Transport Bagi Tenaga Kontrak Kerja dan pihak ketiga dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2019.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Bupati ini untuk penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD serta sebagai acuan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2019.

BAB III

HAK ATAS PEMBERIAN UANG JASA, UANG TRANSPORT DAN PEMBERIAN HADIAH

Pasal 4

- (1) Tenaga Kontrak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dapat diberikan uang jasa.
- (2) Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat mengajukan surat lamaran kerja agar melampirkan kartu Kepesertaan BPJS.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah maka pihak ketiga yang terlibat di dalamnya dapat diberikan uang jasa dan/atau uang transport.

- (4) Pihak Ketiga yang menerima Uang Transport tidak diperkenankan menerima hak atas Biaya Perjalanan Dinas Jabatan.
- (5) Besarnya uang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan uang transport sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini, dan merupakan batasan nilai tertinggi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

BAB IV JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 5

Dalam pelaksanaan kegiatan yang memerlukan Tenaga Kontrak, jangka waktu kontrak disesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan dan jam kerja sesuai dengan jam kerja dinas (Pegawai Negeri Sipil).

BAB V

PEMBEBANAN BIAYA HAK ATAS PEMBERIAN UANG JASA DAN UANG TRANSPORT

Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2019.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja.
pada tanggal 18 Desember 2018
BUPATI BULELENG,



PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 18 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,



DEWA KETUT PUSPAKA
BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2018 NOMOR 77

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

BAGUS GEDE BERATA, SR., MH
NIP. 19630218 198503 1 011

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BULELENG
 NOMOR 76 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBERIAN UANG JASA DAN UANG TRANSPORT BAGI TENAGA
 KONTRAK KERJA DAN PIHAK KETIGA DALAM PELAKSANAAN
 KEGIATAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BULELENG TAHUN
 ANGGARAN 2019

PEMBERIAN UANG JASA DAN UANG TRANSPORT BAGI PIHAK KETIGA DALAM PELAKSANAAN
 KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2019

A. Uang Jasa dan Uang Transport Bagi Pihak Ketiga

No.	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Satuan Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Uang Jasa pada Kegiatan yang tergabung dalam Tim / Panitia			
	a. Sebagai Ketua	Orang/ Bulan	250.000	Nilai tertinggi untuk per-orang/bulan
	b. Sebagai Sekretaris	Orang/ Bulan	225.000	
	c. Sebagai Anggota	Orang/ Bulan	200.000	
	d. Sebagai Staf/Administrasi	Orang/ Bulan	150.000	
2.	Uang Jasa pada Kegiatan yang tidak tergabung dalam Tim/Panitia			
	a. Kegiatan Fisik	Orang/ Hari	150.000	Nilai tertinggi untuk per-orang/hari
	b. Kegiatan Non Fisik	Orang/ Hari	100.000	
3.	Uang Jasa Instruktur / Narasumber / Pengajar / Diklat/ Kursus / Seminar / Rakor / Sosialisasi / Bimtek / Workshop dan Kegiatan Sejenis lainnya			Nilai tertinggi untuk per-orang/jam

No.	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Satuan Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	a. Honorarium Narasumber/Pembahas/Ahli Profesi/ Pakar / Praktisi / Instruktur /Pengajar Luar Kabupaten Buleleng PNS / Non PNS	Orang/Jam.	900.000	
	b. Honorarium Narasumber/Pembahas/Ahli Profesi/ Pakar / Praktisi / Instruktur /Pengajar Dalam Kabupaten Buleleng PNS / Non PNS	Orang/Jam.	300.000	
	c. Moderator Dalam Kabupaten/Luar Kabupaten Dalam Provinsi	Orang/Jam.	250.000	
	d. Moderator Luar Provinsi Bali	Orang/Jam.	700.000	
4.	Uang Jasa Pendamping / Tutor penarikan pekerja anak :			
	a. Pendamping	Orang/bulan	1.250.000	Nilai tertinggi untuk per-orang/bulan
	b. Tutor	Orang/Jam.	100.000	Nilai tertinggi untuk per-orang/jam
5.	Biaya pengganti transport untuk pekerja anak penerima manfaat	Orang/bulan	200.000	Nilai tertinggi untuk per-orang/bulan
6.	Pembaca Doa pada Kegiatan Kursus/ Bimtek/Workshop/ Diklat dan kegiatan sejenis lainnya	Orang/acara	100.000	Nilai tertinggi untuk per-orang/Acara
7.	Kegiatan Jurnalistik Press Release	Orang/kehadiran/ tayangan	150.000	Khusus untuk kegiatan dalam daerah
8.	Jasa untuk pihak ketiga untuk kegiatan penterjemah, pembuatan Kertas Kerja Pembuatan Naskah Penulisan Lontar dan Pengetikan			Nilai tertinggi untuk perlembar kertas (Kwarto / spasi 1,5)
	a. Penterjemah	Lembar	20.000	
	b. Pembuatan Kertas Kerja/ Naskah	Lembar	20.000	

No.	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Satuan Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	c. Pembuatan Naskah d. Penulisan Lontar e. Pengetikan	Lembar Lembar Lembar	20.000 25.000 5.000	
9.	Jasa pengawalan untuk kegiatan pimpinan daerah a. Dalam Kota/dalam Kecamatan Buleleng b. Luar Kota dalam Kabupaten/Luar Kecamatan Buleleng c. Luar Kabupaten/dalam provinsi	Per/Patwal	350.000 600.000 1.000.000	
10.	Biaya Pengganti Trasportasi Pihak Ketiga Lainnya a. Pihak ketiga dari dalam Kab. Buleleng b. Pihak Ketiga dari Luar Kab. Buleleng/Dalam Prov. Bali c. Pihak Ketiga dari Luar Kab. Buleleng/Luar Prov. Bali	orang/PP	100.000 400.000 3.500.000	Nilai tertinggi untuk perorang/ acara
11.	Uang Jasa sebagai Saksi dalam Persidangan Perkara Perdata dan TUN a. Saksi Ahli b. Saksi	Orang/Bulan	2.000.000 500.000	Nilai tertinggi untuk perorang/kehadiran dalam sidang
12.	Biaya Pengganti Transport Untuk Penanganan Perkara a. Dalam Kabupaten b. Luar Kota dalam Provinsi	Orang/Sidang	200.000 500.000	Nilai tertinggi untuk perorang/kehadiran dalam sidang
13.	Jasa Fasilitator Lapangan Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Bidang Perumahan/Bidang Sanitasi: a. Koordinator Fasilitator b. Tenaga Fasilitator	Orang/Bulan	3.500.000 2.500.000	Nilai tertinggi untuk perorang/Bulan

No.	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Satuan Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
14.	Jasa penyebaran/pembagian SPPT-PBB	Orang/Lembar	750	
15.	Jasa Pengisian Form Konfirmasi Wajib Pajak PBB kepada Kepala Lingkungan, Kelian Banjar dan Kelian Subak	Orang/Lembar	12.000	
16.	Jasa Penata Rias			
	a. Rias Biasa (balinese/modern)	Orang/Riasan	110.000	
	b. Rias Agung (payas gede/Lelunakan)	Orang/Riasan	330.000	
17.	Pemberian hadiah dan/atau jasa lainnya	Rupiah	.	Ditetapkan dengan Keputusan Bupati
18.	Tenaga Wajib Kerja Dokter Spesialis	Orang/Bulan	19.000.000	Nilai tertinggi untuk per-orang/Bulan

B. Uang Jasa Bagi Tenaga Kontrak

No.	Uraian	Satuan	Besaran Satuan Biaya sesuai dengan Perpanjangan Kontrak (Tahun)				Keterangan
			0	1-2	3-4	≥ 5	
1	2	3	4	5	6	7	8
a. Tenaga Kontrak Teknis Khusus							
1.	Tenaga Kontrak Selaku Dokter Spesialis.	Orang/Bulan	9.800.000	10.100.000	10.400.000	10.709.000	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai tertinggi untuk per-orang/bulan • Nilai besaran kontrak disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan volume pekerjaan.
2.	Tenaga Kontrak Selaku Dokter Umum / Dokter Gigi.	Orang/Bulan	4.950.000	5.100.000	5.250.000	5.404.500	
3.	Tenaga Kontrak Sarjana Teknik dan selaku Apoteker.	Orang/Bulan	2.719.000	2.800.000	2.881.000	2.965.000	
4.	Tenaga Kontrak selaku Tenaga Khusus Bidang :	Orang/Bulan	3.010.000	3.100.000	3.190.000	3.283.000	
	<ul style="list-style-type: none"> - Teknis Pengelolaan Keuangan. - Analis Hukum. - MC. - Protokol. - Jurnalistik. - Administrasi Korespondensi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. - Ahli Kesehatan . - IT Persandian dan Telekomunikasi. - Promosi Pariwisata. - Pelaksana Fungsi Infrastruktur Jaringan SIPKD. 						

1	2	3	4	5	6	7
	- Administrator Jaringan Online - Programmer - User Interfece Designer - System Administrator					
5.	Tenaga Kontrak selaku Perekam pada sistem online pajak daerah	Orang/Bulan	3.200.000			
6.	Tenaga Kontrak selaku Perekam dan pemecah gambar pada sistem online pajak daerah	Orang/Bulan	3.700.000			
7.	Tenaga Kontrak selaku Operator Consule	Orang/Bulan	3.200.000			
8.	Tenaga Kontrak selaku Admin SIKD	Orang/Bulan	3.750.000			
9.	Tenaga Kontrak selaku Admin SIPKD	Orang/Bulan	3.500.000			
10.	Tenaga kontrak selaku sopir excavator	Orang/Bulan	3.000.000	3.090.000	3.182.700	3.278.500
11.	Tenaga Kontrak selaku Sopir Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah / Ketua DPRD.	Orang/Bulan	2.830.000	2.920.000	3.010.000	3.100.000
12.	Tenaga kontrak Kerja selaku Pembantu Teknisi dan Operator IT Persandian dan Telekomunikasi.	Orang/Bulan	2.525.000	2.600.000	2.675.000	2.753.000
13.	Tenaga kontrak selaku sopir Bus	Orang/Bulan	2.200.000	2.500.000	2.800.000	3.100.000
b. Tenaga Kontrak Teknis Umum						
1.	Tenaga Kontrak terkait Penanganan Jaringan On Line SIPKD.	Orang/Bulan	2.234.000	2.300.000	2.366.000	2.434.000
2.	Tenaga Kontrak selaku : - Sopir Sekretaris Daerah.	Orang/Bulan	2.100.000	2.160.000	2.222.000	2.286.000

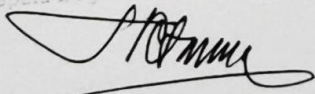
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - Teknis Satuan Polisi Pamong Praja. - Komandan Regu Pemadam Kebakaran. - Teknis Perikanan. - Teknis Pertanian. 					
3.	<p>Tenaga Kontrak sebagai :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tenaga Pengatur, Penjagaan, Pengawalan, Pengawasan dan Perlindungan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan. - Tenaga Kontrak selaku Paramedis (Perawat/Bidan dan Penunjang Medis). - Tenaga Kontrak selaku Tenaga Sistem Informasi Manajemen (SIM) Rumah Sakit. - Tenaga Kontrak selaku Tenaga Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah dengan Sistem On Line. - ADB Kependudukan/Regulator dan Fasilitator Transportasi. - Tenaga Kontrak Teknis Jaringan On Line pada SKPD. - Pasukan (Anggota) Pemadam Kebakaran. 	Orang/Bulan	2.240.000	2.318.000	2.370.000	2.500.000

1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - Tenaga Kontrak Teknis Laboratorium Lingkungan - Pengelola Website pada SKPD. 					
4.	Tenaga Kontrak selaku : <ul style="list-style-type: none"> - Admin Pusat Informasi Layanan Kepegawaian. - Admin Siskeudes. - Admin Profil Desa/Kelurahan. - Sopir Pejabat Eselon II dan Eselon III pada Sekretariat Daerah. 	Orang/Bulan	1.846.000	1.900.000	1.954.000	2.008.000
5.	Tenaga Kontrak selaku : <ul style="list-style-type: none"> - Operator Sistem. - Pelaksanaan Fungsi Infrastruktur Jaringan Sistem Aplikasi Multimedia JARDIKNAS. - Pelaksanaan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). - Sopir Pejabat Eselon II dan Eselon III di luar Sekretariat Daerah. - Sopir Pool. - Sopir Kendaraan Pemadam Kebakaran. - Receptionis di Rumah Jabatan Bupati/Wakil Bupati. 	Orang/Bulan	1.749.000	1.800.000	1.851.000	1.904.000
6.	Tenaga Kontrak selaku Tenaga Teknis Kearsipan	Orang/Bulan	1.700.000	1.748.000	1.798.000	1.849.000

1	2	3	4	5	6	7
7.	Tenaga Kontrak selaku : - Pembantu rumah tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Sekda.	Orang/Bulan	1.555.000	1.600.000	1.645.000	1.692.000
8.	Tenaga Kontrak selaku Analis Sistem	Orang/Bulan	3.370.000	3.468.000	3.560.000	3.657.000
9.	Tenaga Kontrak selaku Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen	Orang/Bulan	2.000.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000
10.	Tenaga Operator Sistem Informasi Kredit Program (SIKP)	Orang/Bulan	2.500.000	2.600.000	2.700.000	2.800.000
11.	Tenaga Kontrak selaku penyuluh Lapangan Keluarga Berencana	Orang/Bulan	1.200.000	1.300.000	1.400.000	1.500.000
12.	Tenaga Kontrak selaku penanganan dan pendampingan hukum terhadap kekerasan perempuan anak	Orang/Bulan	3.000.000	3.100.000	3.200.000	3.300.000
13.	Tenaga Kontrak dalam bidang pelayanan konseling terhadap Perempuan dan Anak yang berhadapan dengan Hukum	Orang/Bulan	3.000.000	3.100.000	3.200.000	3.300.000
14.	Tenaga kontrak selaku petugas teknis kebencanaan	Orang/Bulan	2.200.000	2.300.000	2.400.000	2.500.000
c. Tenaga Administrasi Khusus						
1.	Tenaga Kontrak sebagai Tenaga Administrasi Keuangan pada Badan Keuangan Daerah.	Orang/Bulan	2.200.000	2.300.000	2.400.000	2.500.000
2.	Tenaga Kontrak sebagai Tenaga Administrasi Perizinan dan non perizinan pada DMPPTSP	Orang/Bulan	2.200.000	2.300.000	2.400.000	2.500.000

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Tenaga Kontrak sebagai : - Tenaga Administrasi Kependudukan/Operator Administrasi Kependudukan. - Tenaga Administrasi Keuangan pada SKPD lainnya. - Tenaga Administrasi pada Sekretariat Daerah	Orang/Bulan	1.749.000	1.800.000	1.851.000	1.904.000	
d. Tenaga Administrasi Umum							
1.	Tenaga Kontrak sebagai Tenaga Administrasi Umum pada SKPD lainnya.	Orang/Bulan	1.500.000	1.542.000	1.586.000	1.630.000	
e. Tenaga Lainnya							
1.	Tenaga Kontrak sebagai Satpam/Penjaga Malam.	Orang/Bulan	1.749.000	1.800.000	1.851.000	1.904.000	
2.	Tenaga Kontrak sebagai Tenaga Kebersihan dan Tukang Kebun.	Orang/Bulan	1.250.000	1.350.000	1.375.000	1.400.000	
3.	Tenaga Kontrak sebagai Guru	Orang/Jam	60.000				
4	Tenaga Kontrak Teknis Lainnya.	Orang/Jam	18.000	19.000	20.000	21.000	
5.	Tenaga Kontrak Pendamping Usaha Kecil Menengah (UKM)	Orang/Bulan	2.800.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000	

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum


BAGUS GEDE BERATA, SH.,MH
NIP. 19630218 198503 1 011



BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA